

Kebijakan Pendidikan dan Dampak Sosialnya

Maryam Muharroroh¹, Nanik Setyawati², Indana Roichatul Jannah³, Jakaria Umro⁴

Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: maryammuharroroh@gmail.com; naniksetyawati30@gmail.com; ichaindana30@gmail.com; jkkumro246@uinkhas.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 27 Agustus 2026

ABSTRACT

As a strategic tool that not only shapes the pedagogical system's course but also changes society's social structure, educational policy is vital. The goal of this paper is to thoroughly examine the dynamics of educational policy and the social ramifications that follow. This study looks at a variety of scientific publications, legal papers, and empirical data relating to the application of modern educational policy using a qualitative literature review methodology. According to the analysis, educational policies have two sides: on the one hand, they can promote economic disparity reduction and vertical social mobility. On the other hand, socioeconomic stratification already in place may be strengthened and expanded by unequal access and segregation in the quality of educational institutions. This essay states that in order to reduce detrimental social effects and accomplish long-term social integration, distributive justice-focused educational policies must be developed.

Keywords: *Distributive justice, stratification, social mobility, educational policy, and social impact.*

ABSTRAK

Sebagai alat strategis yang tidak hanya membentuk arah sistem pedagogis tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat, kebijakan pendidikan sangat penting. Tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji secara menyeluruh dinamika kebijakan pendidikan dan dampak sosial yang mengikutinya. Studi ini meneliti berbagai publikasi ilmiah, dokumen hukum, dan data empiris yang berkaitan dengan penerapan kebijakan pendidikan modern menggunakan metodologi tinjauan pustaka kualitatif. Menurut analisis, kebijakan pendidikan memiliki dua sisi: di satu sisi, kebijakan tersebut dapat mendorong pengurangan kesenjangan ekonomi dan mobilitas sosial vertikal. Di sisi lain, stratifikasi sosial ekonomi yang sudah ada dapat diperkuat dan diperluas oleh akses yang tidak setara dan segregasi dalam kualitas lembaga pendidikan. Esai ini menyatakan bahwa untuk mengurangi dampak sosial yang merugikan dan mencapai integrasi sosial jangka panjang, kebijakan pendidikan yang berfokus pada keadilan distributif harus dikembangkan.

Kata Kunci: Keadilan distributif, stratifikasi, mobilitas sosial, kebijakan pendidikan, dan dampak sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan telah lama dipandang sebagai komponen kunci pertumbuhan suatu negara dan pembentukan peradabannya. Lembaga-lembaga akademik dipandang dalam wacana sosiologis pendidikan sebagai arena reproduksi sosial dan budaya serta situs transformasi untuk transfer pengetahuan. Akibatnya, setiap aturan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dalam bentuk kebijakan pendidikan memiliki dampak di luar ruang kelas. Kebijakan-kebijakan ini memiliki implikasi sosiologis yang penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara teoritis, kebijakan pendidikan dimaksudkan untuk menyelesaikan sejumlah masalah saat ini, termasuk meningkatkan akses ke pendidikan formal, menjamin relevansi kurikulum dengan pasar kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, secara empiris, paradoks sosial sering muncul ketika kebijakan diimplementasikan. Inisiatif semacam itu berisiko meminggirkan populasi yang kurang beruntung ketika kebijakan ditetapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik unik dan perbedaan sosial ekonomi suatu wilayah. Misalnya, standarisasi kurikulum nasional dan digitalisasi pendidikan seringkali memperkuat kesenjangan ("kesenjangan digital") antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya mengakibatkan pengucilan sosial.

Meskipun studi-studi sebelumnya telah menunjukkan efektivitas teknis pendidikan manajerial, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk sepenuhnya memahami bagaimana regulasi makro meresap ke dalam struktur sosial mikro masyarakat. Mekanisme regulasi ini menimbulkan efek sosial seperti pergeseran nilai-nilai budaya, isolasi dalam komunitas, dan masalah kredensialisme penilaian berlebihan terhadap sertifikat formal. Dalam konteks ini, tujuan artikel ini adalah untuk mengklarifikasi hubungan sebab-akibat yang kompleks antara kebijakan pendidikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini sangat penting dari segi pendidikan karena akan membantu para pembuat kebijakan mengintegrasikan tujuan dengan keadilan sosial dengan menawarkan rekomendasi berbasis data, atau kebijakan berbasis bukti. Dengan melakukan hal ini, pendidikan dapat sekali lagi berfungsi sebagai katalisator kesetaraan daripada sebagai alat untuk membenarkan ketidakadilan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Dengan analisis induktif-deduktif yang diambil dari sejumlah karya analitis, model penelitian ini menggunakan riset kepustakaan. Proses memahami data teks dikenal sebagai riset kepustakaan. Setelah mengumpulkan data secara metodis dan konsisten, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisisnya. Analisis deduktif kemudian digunakan untuk menjelaskan, memilih, dan mengintegrasikan data untuk mencapai kesimpulan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian, serta data primer untuk memperkuat dan melengkapi data yang dianggap otentik. Jurnal dan buku, seperti yang ditulis oleh Fatimah 2025, Sugiarto 2025, Agustini, 2024, Ningsih dkk., 2026, Haning 2024, dan sumber-sumber terkait lainnya, menyediakan data. Metode yang digunakan peneliti untuk analisis dan interpretasi data didasarkan pada

langkah-langkah analitis: pertama, memproses dan mempersiapkan data untuk ditinjau; kedua, membaca semua data; ketiga, memulai pengkodean semua data penelitian; keempat, mendeskripsikan kategori dan susunan tema yang akan dijelaskan; kelima, menyajikan laporan naratif kualitatif; dan keenam, membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Zonasi

Diskusi ini menempatkan kebijakan zonasi sebagai kebijakan pendidikan yang tidak hanya mengubah cara penerimaan siswa tetapi juga mengubah struktur sosial sekolah. Dampak yang muncul harus dilihat sebagai dampak sistemik karena zonasi berinteraksi dengan kondisi pemukiman, persepsi masyarakat tentang kualitas sekolah, kesiapan sekolah untuk menangani kelas yang beragam, dan kebijakan pendukung lainnya yang menyertainya. Ini berarti bahwa zonasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan seberapa mudah akses ke sekolah, tetapi juga seberapa baik sistem pendidikan mengelola dampak sosial dan pengajaran yang berasal dari perubahan komposisi siswa (Fatimah, 2025).

Dari perspektif akses, zonasi pada dasarnya memperkuat prinsip penyediaan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tinggal dekat rumah mengurangi beban jarak dan biaya, dan juga menciptakan peluang yang lebih adil bagi siswa untuk masuk sekolah di tingkat administrasi. Namun, akses yang lebih setara tidak secara otomatis mengubah kepercayaan sosial tentang sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Ketika label kualitas masih melekat, orang terus mencari cara untuk memastikan anak-anak mereka masuk sekolah yang dianggap terbaik. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan hanya proses seleksi tetapi juga perbedaan kualitas antar sekolah. Selama kesenjangan kualitas tetap tidak teratasi, zonasi dapat menggeser jenis persaingan dari seleksi akademis ke persaingan berbasis strategi. Ini termasuk bagaimana jalur penerimaan dipilih dan penyesuaian pada administrasi tempat tinggal (Sugiarto, 2025).

Perubahan komposisi siswa adalah salah satu efek yang paling jelas dan penting pada kehidupan sekolah. Zonasi mendorong sekolah untuk menerima lebih banyak siswa, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mereka yang berbeda, kebiasaan keluarga, dukungan untuk belajar di rumah, dan kesiapan akademis. Keragaman ini memiliki potensi positif karena sekolah berfungsi sebagai tempat pertemuan sosial yang lebih mencerminkan realitas masyarakat. Dalam konteks pendidikan karakter, kelas yang beragam dapat membantu siswa mengembangkan empati, toleransi, dan kemampuan untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan di antara mereka. Namun, potensi itu tidak terjadi secara otomatis. Jika sekolah tidak memiliki strategi integrasi sosial, keragaman justru dapat menciptakan jarak sosial, yang menyebabkan kelompok pertemanan eksklusif, stereotip, dan bahkan konflik kecil yang berulang. Oleh karena itu, keberagaman perlu dikelola melalui budaya sekolah yang berfokus pada rasa hormat, keadilan, dan ketertiban (Agustini, 2024).

Dampak sosial dari pembagian kelas berdasarkan kemampuan juga terkait dengan perubahan budaya belajar di sekolah. Ketika siswa memiliki rentang

kemampuan yang lebih luas, kecepatan belajar yang dulunya berada pada "kecepatan rata-rata" tertentu tidak lagi efektif untuk semua orang. Guru menghadapi situasi kelas yang membutuhkan penyesuaian: beberapa siswa membutuhkan bantuan dengan keterampilan dasar, sementara yang lain membutuhkan tugas yang lebih menantang agar tetap termotivasi. Jika seorang guru hanya berpegang pada satu cara mengajar, ada risiko bahwa beberapa siswa akan tertinggal sementara yang lain mungkin tidak merasa tertantang. Situasi ini dapat memengaruhi lingkungan kelas karena siswa yang tertinggal mungkin mulai kehilangan kepercayaan diri, sementara mereka yang lebih maju mungkin menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa mereka tidak fokus (Ningsih dkk., 2026).

Karena itu, pembelajaran diferensiasi menjadi kebutuhan nyata, bukan hanya pilihan. Diferensiasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis tugas, pengelompokan yang fleksibel, strategi scaffolding, dan penilaian formatif secara berkala. Penilaian memainkan peran penting dalam pengaturan ini karena kelas yang beragam membutuhkan pemahaman yang jelas tentang kemampuan awal siswa dan pelacakan kemajuan mereka secara berkelanjutan. Sekolah perlu lebih fokus pada asesmen formatif untuk memahami kebutuhan dukungan setiap siswa, termasuk bantuan remedial dan kesempatan pengayaan. Dengan cara ini, keragaman tidak berubah menjadi kesenjangan yang semakin lebar, tetapi malah menjadi fondasi untuk menciptakan layanan pembelajaran yang adil. Pada saat yang sama, guru juga perlu meningkatkan keterampilan manajemen kelas mereka, terutama dalam mengatur transisi aktivitas, menjaga keterlibatan siswa, dan menangani perilaku dengan cara mengajar yang tidak mempermalukan mereka. Manajemen kelas yang kuat merupakan persyaratan untuk pembelajaran efektif yang merespons keragaman dengan baik (Haning, 2024).

Pengelompokan wilayah juga menciptakan ruang baru untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Karena siswa berasal dari daerah setempat, sekolah memiliki peluang lebih baik untuk membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Kemitraan tersebut dapat meningkatkan dukungan pembelajaran, meningkatkan disiplin, dan memperkuat program rutin di sekolah. Namun, perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi keluarga dapat menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi. Sekolah perlu menciptakan strategi komunikasi yang mencakup semua orang sehingga kemitraan tidak hanya dipimpin oleh kelompok tertentu. Mereka juga harus memastikan bahwa semua orang tua merasa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat (Setiawan dkk., 2021).

Secara keseluruhan, zonasi dapat menjadi alat untuk integrasi sosial dan akses yang setara jika disertai dengan peningkatan kualitas sekolah, peningkatan keterampilan guru, dan penyediaan dukungan untuk fasilitas dan infrastruktur. Tanpa dukungan tersebut, zonasi dapat menghasilkan akses yang setara hanya di atas kertas, tetapi tidak akan mewujudkan pengalaman belajar yang setara dan kualitas layanan yang sama. Dengan demikian, kunci keberhasilan zonasi terletak pada kemampuan sekolah dan pemerintah untuk mengelola keragaman sebagai sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang inklusif, dan memastikan bahwa setiap siswa menerima layanan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan mereka.

Desentralisasi Pendidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk menerangi kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memupuk potensi siswa agar mereka dapat menjadi individu yang taat dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, sehat, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, dan warga negara demokratis yang bertanggung jawab." Salah satu program yang menunjukkan bagaimana peraturan ini bekerja adalah penerapan pendidikan wajib sembilan tahun. Di beberapa daerah, terdapat kebijakan pendidikan yang berlangsung hingga 12 tahun. Tujuan kebijakan desentralisasi adalah mulia: untuk membantu pemerintah pusat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanannya bagi semua lapisan masyarakat. Penulis percaya bahwa ketika kebijakan desentralisasi diterapkan, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan meningkat dan lebih efektif. Namun, kebijakan pendidikan wajib tidak akan sepenuhnya efektif jika fasilitas pembelajaran pendukungnya tidak memadai. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa salah satu tantangan dalam mencapai desentralisasi yang efektif adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai di SD Negeri 20 Timbulun (Roni dkk., 2023).

Pendidikan merupakan bagian penting dari masyarakat dan selalu terhubung dengan komunitas, seperti halnya kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Pembangunan sekolah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat karena merupakan fasilitas umum yang banyak digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Kemajuan di SD Negeri 20 Timbulun tidak lebih baik dibandingkan dengan sekolah dasar lainnya. Hal ini cenderung menurun setelah sebelumnya mengalami peningkatan. Ini menunjukkan ketidakstabilan dalam pengembangan fasilitas SD Negeri 20 Timbulun. Selain itu, beberapa SD Negeri 20 Timbulun terletak di dusun. Selain jauh dari ibu kota kabupaten, beberapa SD masih bergantung pada personel militer untuk membantu kegiatan pengajaran karena kurangnya guru yang tersedia. Padahal, ada beberapa bidang yang bertanggung jawab atas desentralisasi pendidikan di daerah, dan salah satu bidang tersebut adalah pengembangan sumber daya manusia, yang dekat dengan sekolah. Tidak semua pendidik mampu dan siap melaksanakan peran mereka dalam mengajar, terutama di daerah perbatasan. Itu.

Dampak globalisasi terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengaruh globalisasi, di mana pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era perdagangan bebas juga menghadirkan tantangan bagi sistem pendidikan Indonesia, karena membuka peluang bagi lembaga pendidikan dan pendidik dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Untuk bersaing di pasar global, kebijakan pendidikan nasional perlu meningkatkan kualitas pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Kebijakan tersebut juga perlu meningkatkan manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien sekaligus memberikan akses luas bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan. Ketidaksiapan bangsa kita dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi dan bermoral yang siap

terlibat dan berkontribusi di arena global menyebabkan dampak positif dan negatif globalisasi terhadap pendidikan, yang dijelaskan pada poin-poin berikut (Roni dkk., 2023) :

1) Dampak Positif

Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi telah mengubah cara pengajaran dalam sistem pendidikan. Pengajaran tradisional telah berubah menjadi pengajaran yang menggunakan teknologi baru seperti internet dan komputer. Dahulu, guru menggunakan kapur tulis untuk menulis, terkadang menggambar gambar sederhana atau menggunakan suara dan alat sederhana lainnya untuk berbagi pengetahuan dan informasi. Sekarang sudah ada komputer. Jadi, tulisan, film, suara, musik, dan gambar bergerak dapat digabungkan untuk menciptakan cara berkomunikasi. Dalam kasus balon atau pegas, dapat dilihat bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu objek. Dahulu, ketika seorang guru berbicara tentang bagaimana energi dapat mengubah bentuk suatu objek tanpa menggunakan alat multimedia, siswa mungkin tidak langsung memahaminya. Guru yang bijak tentu akan menjelaskan dengan contoh, tetapi mendengarkan tidak seefektif melihat. Levie dan Levie (1975) dalam Arsyad (2005) meninjau kembali temuan penelitian tentang pembelajaran melalui rangsangan kata, visual, dan verbal. Mereka menyimpulkan bahwa rangsangan visual mengarah pada hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan fakta dengan konsep.

2) Dampak Negatif

a) Komersialisasi Pendidikan

Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak sekolah didirikan terutama sebagai sarana untuk berbisnis. John Micklethwait menceritakan kisah tentang persaingan bisnis yang memasuki sektor pendidikan dalam bukunya "The Perfect Future." Ia menjelaskan bahwa kedatangan perusahaan pendidikan menandakan kembalinya pendekatan yang berfokus pada masa depan. Salah satu ciri utamanya adalah semangat pengujian siswa ala Victoria, yang dapat membawa kegembiraan bagi Mr. Gradgrind dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan ini perlu menunjukkan bahwa mereka memberikan hasil, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk pemegang saham.

b) Bahaya Dunia Maya

Dunia maya, selain menjadi cara mudah untuk mengakses informasi, juga dapat berdampak negatif pada siswa. Ada juga berbagai jenis materi yang berdampak negatif yang tersebar di internet. Misalnya: pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan hal-hal serupa. Berita terkait pelecehan, seperti pedofilia dan pelecehan seksual, mudah diakses oleh siapa saja, termasuk siswa. Barang-barang seperti Viagra, alkohol, dan narkoba tersedia secara luas untuk dijual di internet. Misalnya, pada tanggal 6 Oktober 2009, dilaporkan bahwa seorang siswi SMA di Jawa Timur meninggalkan sekolah untuk bertemu dengan seorang pria yang dikenalnya melalui situs jejaring sosial "Facebook". Hal ini sangat berbahaya bagi proses pengajaran dan pembelajaran.

c) Ketergantungan

Komputer dan internet adalah contoh mesin globalisasi yang dapat menyebabkan kecanduan baik pada guru maupun siswa. Tanpa sumber daya ini, hal ini dapat menyebabkan pendidik dan peserta didik kehilangan antusiasme terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.

d) Paradigma Pendidikan Nasional Sekuler-Materialisme

Terlepas dari apakah kita mengakuinya atau tidak, sistem pendidikan Indonesia saat ini bersifat sekuler-materialistis. Salah satu contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI tentang Jalur, Tingkat, dan Jenis Pendidikan, Bagian Satu (Umum), Pasal 15: "Jenis-jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, pendidikan advokasi, pendidikan agama, dan pendidikan khusus." Kontras antara pendidikan umum dan pendidikan agama dicontohkan dalam esai ini. Melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara institusional, sistem pendidikan biner ini gagal menghasilkan orang-orang yang taat beragama dengan karakter dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan perkembangan. Madrasah, lembaga keagamaan, dan pesantren (sekolah berasrama Islam) yang dikelola oleh Kementerian Agama merupakan contoh bagaimana pendidikan menjadi lebih sekuler. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional mengawasi pendidikan umum melalui pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pascasarjana. Terdapat persepsi kuat bahwa Kementerian bertanggung jawab atas kemajuan ilmu hayati (sains dan teknologi), yang dianggap tidak ada hubungannya dengan agama. Pengembangan karakter siswa, aspek penting dalam pendidikan, tidak mendapat perhatian yang cukup. Alih-alih menjadi dasar dari segalanya, agama dipandang hanya sebagai salah satu komponen yang memiliki peran kecil. Memang benar bahwa orang-orang yang menerima pendidikan sekuler-materialistis ini dapat menjadi ahli dalam sains dan teknologi melalui pendidikan umum mereka. Namun, hal itu terbukti tidak efektif dalam membentuk kepribadian dan pengetahuan agama siswa. Sejumlah besar lulusan pendidikan umum "buta agama" dan memiliki kepribadian yang lemah. Di sisi lain, siswa yang belajar di lingkungan pendidikan agama tidak tertarik pada sains dan teknologi, tetapi mereka memiliki kepribadian yang baik dan menguasai pengetahuan agama. Dengan demikian, kaum awam mendominasi sektor-sektor saat ini. Orang-orang yang memahami agama membangun alam semesta mereka sendiri dan tidak mampu beradaptasi di dunia modern.

e) Biaya Pendidikan yang Sangat Mahal

"Pendidikan berkualitas itu mahal" adalah pernyataan yang populer. Mereka percaya bahwa harga pendidikan yang baik yang tinggi tidak terjangkau. Masyarakat miskin terpaksa putus sekolah karena tingginya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga universitas. Kebijakan pemerintah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (SMA), yang di Indonesia dipandang sebagai upaya untuk mengumpulkan dana, terkait erat dengan kenaikan harga pendidikan saat ini. Akibatnya, pengusaha selalu dibutuhkan dalam komite sekolah, yang merupakan organ SMA. Diasumsikan bahwa pengusaha memiliki akses lebih besar terhadap pendanaan. Akibatnya, semua biaya dialihkan kepada orang tua sesuai dengan keputusan komite setelah komite

sekolah dibentuk. Namun, karena komite sekolah terkait erat dengan sekolah, penggunaan dana menjadi tidak transparan.

f) **Kualitas Sumber Daya Manusia yang Buruk**

Paradigma pendidikan nasional yang sekuler-materialistis adalah alasan mengapa kepribadian siswa Indonesia semakin bermasalah. Indonesia jauh tertinggal dari negara lain dalam hal tingkat keterampilan. Kualitas sumber daya manusia Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan India, sebuah negara yang dilanda berbagai masalah, termasuk kemiskinan, kelaparan, dan tingkat pendidikan yang rendah. India mampu menghasilkan sumber daya manusia dengan kaliber yang sangat tinggi. Banyak warga India telah mendapatkan pekerjaan penting di pasar global, tetapi Indonesia masih bermasalah dengan deportasi dan rencana pemindahan buruh tidak terampil ke luar negeri. Selain itu, kekurangan guru di sejumlah distrik di Indonesia merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia yang buruk, yang harus segera diatasi. Kita membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan formal dan non-formal untuk menghadapi era globalisasi.

Menyesuaikan Pendidikan Indonesia dengan Era Globalisasi Sistem pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi dalam beberapa hal. Ketidaksiapan ini bukan berarti arus global akan begitu saja membawa negara kita pergi. Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada globalisasi, khususnya dalam konteks regional, tetapi kita harus mengakui bahwa saat ini Indonesia berada dalam fase transisi. Menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif adalah salah satu isu yang dihadapi sistem pendidikan kita. Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan, reposisi strategis, dan visi. Kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari metamorfosis yang terus berputar tanpa hal-hal tersebut. Kemungkinan besar Indonesia akan bangkit kembali pada tahun 2020 untuk menjadi negara yang lebih kuat dan lebih sukses, juara globalisasi, dengan visi yang jelas, tahapan yang jelas, komitmen dari semua pihak, dan kepemimpinan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Kesejahteraan Guru Honorer

Krisis kesejahteraan guru honorer di Indonesia menjadi kerentanan sistemik yang membahayakan fondasi pendidikan negara, bukan sekadar masalah ketenagakerjaan. Pemeriksaan akademis yang mempertimbangkan ekonomi rumah tangga, tata kelola regulasi, dan efek sosial-psikologis yang ditimbulkannya dapat membantu mengungkap intrik masalah ini berdasarkan data dan penelitian yang tersedia. Penjelasan menyeluruh tentang dinamika krisis dan berbagai efek sosial yang ditimbulkannya diberikan di bawah ini (Syahriva dkk., 2026):

1) **Anatomi Krisis**

Gaji Rendah dan Fenomena Ketidakpastian Guru honorer terjebak dalam kondisi ketidakpastian ekstrem dari sudut pandang struktural. Penurunan nilai profesi guru ditunjukkan oleh ketidaksetaraan finansial yang mencolok, dengan 74% instruktur honorer mendapatkan kurang dari Rp 2 juta per bulan, bahkan ada yang hanya mendapatkan Rp 150.000 hingga Rp 300.000. Masalah manajemen arus kas yang disebabkan oleh fenomena "Gaji Tertunggak" memperburuk skenario ini. Guru

honorar tidak aman secara finansial karena gaji mereka sangat bergantung pada siklus pencairan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seringkali tertunda hingga tiga bulan. Dari perspektif akademis, ini bukan lagi hanya tentang "gaji rendah," tetapi lebih kepada ketidakstabilan sistemik yang merampas hak karyawan atas kompensasi yang tepat waktu dan adil.

2) Efek Domino Struktural dan Dampak Sosial

Tatanan sosial dan kesejahteraan para pendidik terancam oleh kombinasi gaji yang tidak memadai dan keterlambatan pembayaran. Tekanan finansial muncul ketika pendapatan formal stagnan dan tuntutan rumah tangga mendesak. Banyak pengajar mengambil langkah cepat yang berbahaya karena kurangnya literasi keuangan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang tersembunyi di balik layar, mengungkapkan bahwa 42% dari semua korban pinjaman internet ilegal adalah guru. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mendidik negara adalah target paling rentan dari predator keuangan online, yang merupakan ironi sosial yang besar. Lebih jauh lagi, sebagian besar profesor kehormatan tidak tercakup oleh subsidi Kesehatan atau Ketenagakerjaan BPJS. Kecemasan tentang masa depan disebabkan oleh ambiguitas kontrak dan kurangnya jaminan sosial (kecemasan karier). Daya beli yang rendah ini menyebabkan sejumlah kerentanan di tingkat rumah tangga, termasuk ketidakmampuan untuk mendapatkan perumahan dan ketidakmampuan untuk memenuhi ketahanan pangan keluarga yang memadai. Sebagian besar guru honorar (67,9%) terpaksa menggunakan taktik bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti barter, menjadi pengemudi ojek motor yang nekat, atau memberikan les privat. Dampak sosialnya sangat memengaruhi kualitas pendidikan, menyebabkan kelelahan kondisi kelelahan fisik dan mental dan beban ganda yang mengurangi kemampuan instruktur untuk berkonsentrasi dan menyediakan materi pengajaran. Mereka masih harus menyesuaikan diri dengan aturan baru seperti Kurikulum Merdeka, yang memiliki banyak persyaratan administratif dan tidak ada imbalan yang sepadan, meskipun mengalami kelelahan kerja akibat tuntutan administratif kurikulum baru tersebut.

3) Tumpang tindih peraturan dan jebakan fiskal adalah inti dari masalah ini.

Karena tata kelola kelembagaan dan kebijakan fiskal adalah pendorong utama masalah ini, maka masalah ini terus berlanjut: Ketergantungan pada Alokasi Dana BOS: Aturan Dana BOS, yang membatasi komponen honorarium pada 15% hingga 50%, memiliki dampak signifikan pada kompensasi guru honorar. Sekolah tidak memiliki kesempatan untuk menawarkan gaji yang manusiawi karena pembatasan ini. Hambatan Birokrasi PPPK: Meskipun dipuji sebagai solusi yang tepat, program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membutuhkan waktu lama untuk berjalan. Karena koordinasi kelembagaan horizontal yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan fiskal regional, implementasinya mengalami hambatan. Kebuntuan Regulasi: Pendidik non-ASN belum dapat menerima kesejahteraan yang stabil dan kejelasan hukum karena peraturan yang tumpang tindih. Salah satu contoh mencolok dari ketidaksetaraan struktural di sektor pendidikan adalah dilema upah guru honorar. Merupakan penyimpangan kebijakan untuk mengharapkan instruktur yang terjebak dalam kemiskinan dan hutang untuk menjadi sangat profesional dan

saling mengajar. Rantai kerentanan sosial di pusat akan terus berlanjut dan pada akhirnya membahayakan kualitas generasi mendatang jika tidak ada reformasi fiskal yang substansial, harmonisasi regulasi regional, dan jaminan perlindungan sosial yang nyata.

SIMPULAN

Saat ini, dinamika pendidikan nasional berada dalam ekosistem transformasi struktural yang kompleks, di mana berbagai kebijakan regulasi secara aktif berinteraksi dengan realitas ekonomi lokal. Kualitas kinerja dan kesetaraan sistem pendidikan Indonesia ditentukan oleh ekosistem yang kohesif yang mencakup peraturan zonasi, desentralisasi, hambatan globalisasi, dan krisis kesejahteraan instruktur honorer. Pada intinya, kebijakan zonasi merupakan upaya terencana untuk memperkuat gagasan akses yang adil terhadap pendidikan bagi masyarakat sekitar. Namun, kemampuan sistem untuk secara metodis menangani pergeseran komposisi sosial-akademik siswa merupakan indikator yang lebih baik tentang efektivitas zonasi daripada sekadar mengurangi jarak geografis. Untuk menghindari kesenjangan hasil belajar yang semakin besar, pembelajaran diferensiasi, manajemen kelas adaptif, dan peningkatan penilaian formatif harus diimplementasikan dalam berbagai mata pelajaran karena keberagaman latar belakang siswa. Persaingan untuk penerimaan siswa akan terus bergeser dari seleksi akademik ke manipulasi administratif selama perbedaan kualitas antar sekolah tidak diatasi. Hal ini akan membutuhkan integrasi budaya sekolah yang inklusif dan hubungan komunitas yang adil. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di tingkat regional sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Namun, kesenjangan infrastruktur dan kekurangan sumber daya manusia terus menghambat implementasinya, terutama di distrik-distrik terpencil dan perbatasan. Namun, untuk meningkatkan efisiensi kognitif siswa, globalisasi mengharuskan lembaga pendidikan untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan menggunakan teknologi multimedia ke dalam pengajaran visual-verbal. Komersialisasi pendidikan, risiko terhadap moralitas di dunia maya, ketergantungan teknologi, dan penguatan paradigma sekuler-materialistis yang cenderung meremehkan aspek spiritual dan karakter pendidikan adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penetrasi global ini. Masalah kesejahteraan guru honorer yang multifaset merupakan kelemahan paling signifikan dalam sistem pendidikan negara. Konsep kemiskinan struktural di kalangan pendidik merupakan akibat dari ketidakamanan finansial yang disebabkan oleh gaji yang tidak memadai dan ketergantungan yang besar pada siklus pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kerentanan tinggi terhadap jebakan keuangan ilegal (pinjol), kurangnya jaminan sosial (BPJS), dan kelelahan fisik dan mental (burnout) sebagai akibat dari beban pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup (strategi bertahan hidup) merupakan gejala dari krisis ini. Tumpang tindihnya peraturan fiskal daerah dan hambatan birokrasi dalam sistem Perjanjian Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPPK) memperburuk masalah ini. Secara keseluruhan, reformasi pendidikan Indonesia tidak akan berhasil jika

diimplementasikan secara parsial. Tanpa infrastruktur yang setara dan perubahan kesejahteraan pendidik, kebijakan zonasi inklusif dan desentralisasi yang beradaptasi dengan globalisasi akan tetap menjadi ide teoritis. Merupakan suatu anomali kebijakan untuk mengharapkan profesionalisme dan pengajaran yang unggul dari guru yang miskin dan rentan terhadap inspeksi regulasi. Oleh karena itu, untuk mencapai layanan pembelajaran yang adil, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, diperlukan komitmen politik-fiskal yang signifikan, harmonisasi hukum lintas sektoral, dan pengelolaan sampah sebagai modal sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, B. R. (2024). Dampak kebijakan pemerintah terkait sistem zonasi pendidikan study di SMAN 1 aikmel.EDUPEDIKA: Jurnal Studi Pendidikan dan Pembelajaran,3(1), 1-7.
- Cecilia Sutisna, Shanriva., & Indah Permata Nastia, Gina. (2026). KRISIS KESEJAHTERAAN GURU HONORER : RENDAHNYA UPAH DAN SULITNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 11(11), Hal.2-3.
- Fatimah, M. N. (2025). Analisis kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi,17(8), 91-100.
- Haning, Y. U., Datuk, A., Ramlah, S. T., Julyyanti, Y., & Idris, I. (2024). Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam ppdb terhadap kesetaraan hak anak mendapatkan pendidikan di sma negeri 2 kupang.Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi,6(2), 158-165.
- Indra Partini, Roni., Nurti, Syafni., & Fadriati. (2023). ANALISIS DAN DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG DESENTRALISASI PENDIDIKAN, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>, 6(4), Hal.3334-3337.
- Ningsih, F., Upriani, N., & Jalaludin, J. (2026). Evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru terhadap pemerataan akses pendidikan berkualitas: studi kepustakaan.AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis,6(1), 425-433.
- Setiawan, F., Rifkisyahputra, R., Nihayah, N. A., & Hilay, A. (2021). Analisis sistem zonasi terhadap peserta didik.Jurnal Inovasi Penelitian,2(2), 679-690.
- Sugiarto, S. (2025). Dampak sistem zonasi terhadap prestasi belajar pada SMAN1 pangkah.Jurnal Economic Edu,5(02), 50-54